LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN MARET DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 10 April 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 26,84 %

b. Keuangan = 4.537.887.179 (23,72%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	14.550.000			7.946.000		
1	Konsultasi dan Koordinasi	14.550.000	52,07	28,24	7.946.000	(23,83)	Menyesuaikan Kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			2.360.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	14,93	6,52	2.360.000	(8,41)	Menyesuaiakan kebutuhan

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.550.000			13.725.940		
1	Pelayanan Informasi	48.550.000	28,39	28,30	13.725.940	(0,09)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	230.490.000			28.340.000		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	230.490.000	12,41	12,30	28.340.000	(0,11)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	146.165.000			28.125.311		
1	Penggerakan KB Pria Bersama Mitra	25.528.000	13	12,30	2.843.000	(0,70)	
2	Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan	24.793.000	11,47	11,20	2.843.000	(0,27)	Adanya efisiensi anggaran sehingga ada perubahan jadwal kegiatan.
3	Pengembangan Konten Media KIE	95.844.000	23,40	23,15	22.439.311	(0,25)	
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	7	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Kegiatan Raker BKOW tidak sesuai rencana pelaksanaan (PP);
2. Rapergub RAD Perlindungan Anak masih dalam proses finaliasi karena belum ada kesepakatan dengan Tim Penyusun serta menyesuaikan jadwal Tim (PA);
3. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2025 akan disesuaikan dengan Renstra baru

Upaya

1. Kegiatan Raker BKOW dilaksanakan menyesuaikan jadwal BKOW (PP);
2. Koordinasi secara intens antar Tim Penyusun RAD Perlindungan Anak (PA);

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Layanan terhadap korban kekerasan peremp uan dan anak (UPTD);
2. Sosialisasi SRA melalui zoom mengundang satuan pendidikan terutama SMA (PHA);
3. Pelayanan KB MKJP (KB);
4. Ngopi Penak (KG);
5. PPEP (KG);
6. Kegiatan Forum PD (renstra dan Renja) dengan tema : Sinergi Bersama dalam mendukung Kinerja PPPA dan Dalduk KB Jawa Tengah yang Ngopeni dan Nglakoni (Program);

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Diharapkan semua pegawai memahami tentang gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS serta dapat melaporkannya jika ditemukan indikasi terjadinya gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis, 10 April 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001